



DPRD Awasi Tindak Lanjut Laporan BPK

JAKARTA, KOMPAS — DPRD DKI Jakarta membentuk panitia khusus untuk mengawasi tindak lanjut sejumlah catatan Badan Pemeriksa Keuangan terkait laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2014. Tercatat ada 70 temuan bernilai Rp 2,16 triliun. Temuan itu terdiri dari program yang berindikasi kerugian daerah Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah Rp 1,71 triliun.

"Sesuai peraturan, DPRD bertugas mengawasi tindak lanjut catatan BPK," kata Ketua Panitia Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan (Pansus LHP) BPK sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, Kamis (6/8).

Triwisaksana menyebutkan, enam poin catatan BPK, antara lain, terkait pemanfaatan aset tanah seluas 30,88 hektar di Mangga Dua, pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras yang berindikasi merugikan daerah Rp 191,33 miliar, serta penetapan nilai penyertaan modal dan penyerahan aset ke PT Transportasi Jakarta yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Pengelolaan aset

Pada rapat perdana yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD DKI Jakarta, Kamis sore, Pansus LHP BPK memfokuskan pembahasan terkait pengawasan dan pengendalian kerja sama pemanfaatan lahan di Mangga Dua dengan PT Duta Pertiwi. Pengawasan dinilai lemah dan tidak menjamin keamanan aset DKI.

Kerja sama dilakukan sejak tahun 1984 di atas lahan pemakaman umum untuk mengatasi kemacetan di Jalan Hayam Wuruk serta untuk mengembangkan kawasan itu. Sebagai kompensasi, PT Duta Pertiwi mendapat izin penggunaan serti-

fiat hak guna bangunan (HGB) di atas lahan milik Pemprov DKI. Namun, sebagian lahan dinilai belum bersertifikat hak penggunaan lahan dan sebagian tidak jelas sertifikatnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, catatan itu sebenarnya sudah dijelaskan dan diklarifikasi ke BPK. Namun, hasil klarifikasi tidak tercantum dalam LHP. Pihaknya kini siap menunjukkan sertifikat, dokumen kerja sama, dan sejumlah kewajiban yang ditunai-kan PT Duta Pertiwi.

"Ada sebagian lahan yang diminta sertifikat HGB-nya. Menurut kami, tidak semua lahan (dari total lahan yang dikerjasamakan) disertifikatkan karena wujudnya fasilitas sosial/umum, trase jalan, atau jalur pedestrian. Tentunya total lahan bersertifikat tidak sama luas dengan luas lahan yang dikerjasamakan," ujarnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat usul agar Pansus mengundang BPK, PT Duta Pertiwi, Badan Pertanahan Nasional, serta Pemprov untuk mengklarifikasi temuan itu dan menyamakan persepsi.

Pekan depan, Pansus berencana mengundang semua pihak guna membahas temuan itu. Selain soal pengelolaan aset, akan dibahas pengadaan lahan di Rumah Sakit Sumber Waras. (MKN)